

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASEAN adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Organisasi ini awalnya didirikan oleh lima negara; Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura, yang bertemu di Bangkok, Thailand. Resmi dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan nama lengkap *Association of Southeast Asian Nations* yang disingkat menjadi ASEAN. Kelima negara tersebut memiliki beberapa kesamaan yang mendorong mereka membentuk organisasi ini. Kesamaan tersebut mencakup letak geografis yang berdekatan, latar belakang budaya yang serupa, dan pengalaman sejarah yang hampir sama dalam menghadapi penjajahan, kecuali Thailand. Mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun perekonomian bersama, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan Asia Tenggara (Khaldun, 2022).

Pembentukan ASEAN pun dilatarbelakangi dari kondisi politik dan perebutan ideologi blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin, yang menciptakan ketegangan geopolitik yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Situasi internasional yang kompleks tersebut mendorong negara-negara di kawasan ini membentuk suatu organisasi regional yang mampu bergerak dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah. Oleh sebab itu, ASEAN didirikan tidak sekadar sebagai wadah kerja sama ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen diplomasi strategis untuk meredam potensi konflik dan mencegah intervensi kekuatan asing. Kemudian, ASEAN memiliki tujuan lain yang ingin dicapai selain pembangunan ekonomi, yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang, yakni politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, stabilitas, serta perdamaian. Tujuan multidimensi tersebut mencerminkan komitmen ASEAN untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang tangguh, mandiri, dan mampu mengelola berbagai dinamika internal maupun eksternal secara berkelanjutan (Khaldun, 2022).

Timor Leste merupakan negara terakhir yang bergabung menjadi anggota ASEAN namun masih berstatus sebagai pengamat (*observer*) sejak tahun 2022 serentak dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan 41 di Kamboja, setelah mengajukan bergabung di tahun 2011. Setelah Timor Leste

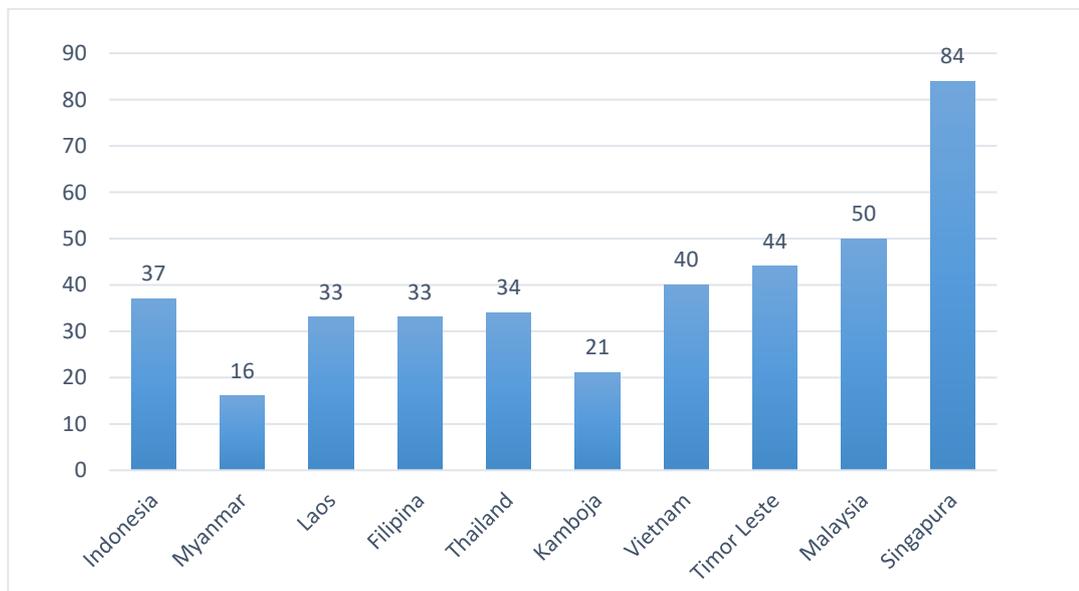
bergabung, maka keanggotaan ASEAN menjadi 11 negara, yang terdiri dari Filipina, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste. Penambahan anggota ini menandakan semakin luasnya wilayah kerja sama dan potensi pengembangan ekonomi, sosial, dan politik di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang bagi Timor Leste untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif regional yang dilakukan ASEAN.

Selaras dengan salah satu tujuan pembentukan ASEAN mengenai pembangunan, maka digunakan indikator ekonomi untuk mengukur pencapaian pembangunan yang dituju. Pembangunan negara dapat dicapai melalui indikator ekonomi, salah satunya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan negara dianggap berhasil apabila pertumbuhan ekonomi negara tinggi, karena meningkatkan kesejahteraan harus memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil yang diukur dari persentase kenaikan PDB negara (Sukirno, 2008). Perubahan pertumbuhan dalam ekonomi selalu dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama dari pembangunan (Kuncoro, 2010).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa suatu negara semakin sejahtera. Ketika ekonomi berkembang, negara menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga berarti negara tersebut terus berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Karena itu, melihat pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengetahui apakah suatu negara berhasil membangun dan membuat kehidupan warganya lebih baik. Namun, dalam perjalanan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tiap negara di ASEAN menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masalah korupsi (Fajar & Azhar, 2019).

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri (*World Bank* dan IMF). Pengertian lainnya juga menyebutkan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dan dapat menyebabkan *high cost economy* dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi telah lama menjadi isu yang memprihatinkan, terutama di negara-negara berkembang, salah satunya di kawasan Asia Tenggara yang didominasi oleh negara-negara berkembang. Praktik korupsi yang meluas dapat menggerogoti fondasi ekonomi negara, yang mana permasalahan ini mampu

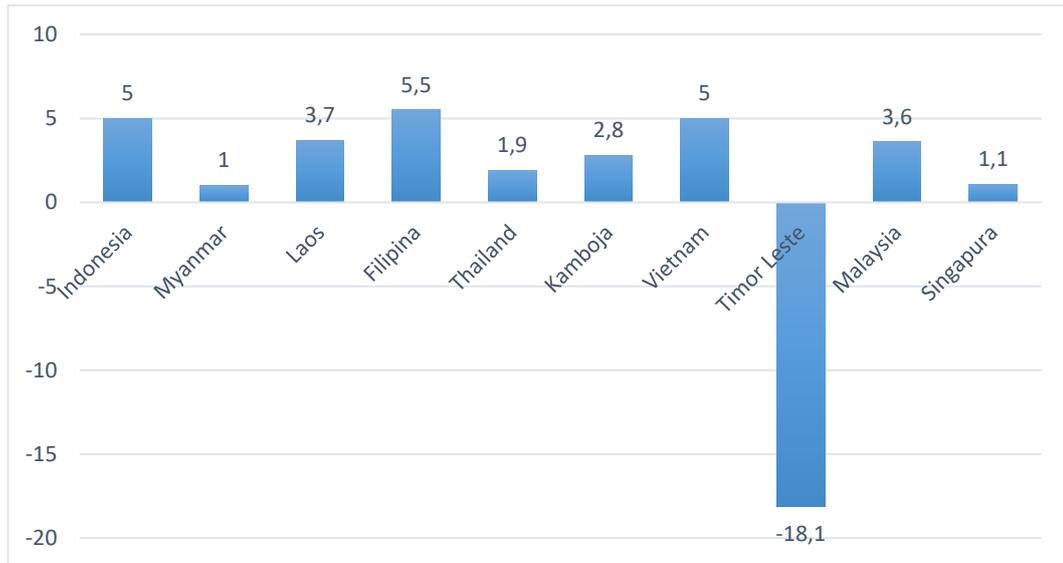
menghambat investasi, menurunkan tingkat kesejahteraan, dan menimbulkan masalah pada lingkungan dan pembangunan ekonomi (Lana & Khoirudin, 2022). Korupsi dipahami sebagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang bisa saja terjadi di berbagai negara dan dengan tingkat yang berbeda (Shelemo, 2023). *Transparency International* merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada isu korupsi global dan secara rutin menerbitkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang mengukur tingkat korupsi di berbagai negara.



Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 1.1 Skor Indeks Persepsi Korupsi di ASEAN Tahun 2024

Data untuk gambar 1.1, terlihat pada tahun 2024, Singapura menduduki peringkat pertama di ASEAN serta menduduki peringkat 5 di dunia dengan skor 84. Singapura merupakan satu-satunya negara dengan identitas negara maju di ASEAN, kemudian negara-negara lainnya merupakan negara berkembang. Setelah Singapura, diikuti dengan Malaysia di peringkat ke dua dengan skor 50. Kemudian dilanjutkan dengan Timor Leste dengan skor 44, Vietnam dengan skor 40, dan 6 negara lainnya di bawah skor 40, di antaranya Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di kawasan Asia Tenggara, mengingat bahwa semakin kecil skor IPK, maka makin korup negara tersebut.



Sumber: *World Bank*, 2023

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Tahun 2023

Data pada gambar 1.2, pada tahun 2023, negara-negara ASEAN menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang beragam. Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1%, sementara Filipina menunjukkan kinerja yang paling impresif dengan pertumbuhan 5,5%. Indonesia, ekonomi terbesar di kawasan, mengalami pertumbuhan 5%, diikuti oleh Thailand dengan 1,9% dan Malaysia dengan 3,6%. Vietnam menunjukkan pertumbuhan 5%, sementara Kamboja mengalami pertumbuhan 2,8%, serta Myanmar 1%. Timor Leste menghadapi tantangan dengan angka pertumbuhan -18,1%, ini disebabkan menurunnya produksi pada sektor minyak dan gas yang merupakan sumber pendapatan utama Timor Leste. Meskipun masih dalam proses pemulihan pascapandemi, kawasan ASEAN secara keseluruhan menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif baik.

Dalam melihat kaitan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, sejarawan dan ahli politik telah menyoroti bagaimana korupsi dapat berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan persentase dari perubahan PDB, sedangkan PDB merupakan hasil penjumlahan antara konsumsi (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Apabila dana publik disalahgunakan atau terjadi penyelewengan, anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan akan berkurang, sehingga belanja pemerintah (G) ini tidak memberikan manfaat secara maksimal

untuk masyarakat. Dengan adanya praktik korupsi, para investor jadi enggan menanam modal di lingkungan yang penuh risiko sehingga menghambat investasi (I). Selain itu, daya beli masyarakat (C) bisa melemah dikarenakan korupsi akan memperburuk ketimpangan pendapatan dan kualitas layanan publik. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat karena PDB tidak berkembang secara optimal. Pernyataan ini didukung oleh (Sri Nawatmi, 2014) yang menyatakan bahwa praktik korupsi dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan, dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kemiskinan.

Dalam dunia politik, korupsi membuat demokrasi dan pemerintahan yang baik sulit terwujud karena merusak sistem yang sudah dibangun. Korupsi dalam pemilu dan lembaga legislatif mengurangi transparansi dan keadilan dalam pembuatan kebijakan. Jika terjadi di sistem peradilan, korupsi melemahkan penegakan hukum, sementara di pemerintahan, korupsi menyebabkan layanan publik menjadi tidak adil. Secara keseluruhan, korupsi melemahkan kinerja lembaga pemerintahan dengan mengabaikan aturan, menyalahgunakan sumber daya, dan memberi jabatan kepada orang yang tidak kompeten. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang, dan nilai-nilai demokrasi pun terancam.

(Aidt et al., 2008) menyatakan peran dari akuntabilitas politik atau institusi menentukan hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Berkembangnya suatu perekonomian dengan cepat haruslah didukung dengan kestabilan politik (Triani, 2016). Ketika pemerintah dan lembaga negara bekerja dengan baik dan diisi oleh orang-orang yang pintar dan jujur atau berintegritas, korupsi yang rendah akan membantu ekonomi tumbuh lebih cepat. Artinya, jika korupsi sedikit, ekonomi akan berkembang pesat. Namun jika korupsi banyak terjadi, ekonomi akan melambat dan tidak berkembang dengan baik. Contohnya seperti kasus yang baru saja terjadi pada salah satu perusahaan energi di Indonesia, yang memperlihatkan manipulasi proses distribusi bahan bakar yang tak hanya merugikan negara, namun juga merugikan masyarakat atau konsumen secara langsung. Tak hanya di Indonesia, kasus korupsi pun terjadi di negara ASEAN lainnya seperti Vietnam pada tahun 2023 terkait penggelapan dana secara besar-besaran, ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal yang didasari oleh lemahnya kualitas institusi

sehingga terjadi penyelewengan yang kemudian akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di lihat dari arah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Menurut teori modernisasi yang dikemukakan oleh Seymour Martin Lipset, pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perkembangan institusi yang lebih baik. Pendapatan perkapita menciptakan masyarakat kelas menengah ke atas lebih kritis dan menuntut tata kelola yang lebih baik. Dengan pertumbuhan ekonomi, akan memberi peluang bagi negara untuk membayar pegawai negeri lebih baik dan layak, serta dapat membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Namun, yang namanya rencana tak akan selalu mulus seratus persen, negara masih sering kecolongan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari peluang untuk korupsi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk memperbaiki program pembangunan. Besarnya arus dana yang mengalir ini akan menciptakan peluang korupsi melalui berbagai modus, contohnya seperti pengikisan anggaran dan suap dalam proses *tender*. Pengikisan anggaran yang dimaksud adalah pengurangan dana secara ilegal dari anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi melalui cara-cara seperti menaikkan harga secara berlebihan, membuat proyek palsu, atau mengurangi kualitas dan jumlah barang atau jasa yang disediakan. Akibatnya, uang negara tidak digunakan dengan efisien, dan pembangunan bisa terhambat. Selain itu, suap dalam proses *tender* juga sering terjadi, di mana seseorang memberi uang atau hadiah kepada panitia lelang agar memenangkan proyek, meskipun sebenarnya tidak layak. Jika ini terus terjadi, hasil pembangunan bisa buruk dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Meski demikian, ada pendapat yang mengungkapkan bahwa korupsi dapat mengurangi biaya dikarenakan mempermudah birokrasi, korupsi dianggap sebagai pelumas roda ekonomi yang mempercepat proses birokrasi di negara-negara dengan regulasi yang rumit (Nathaniel, 1964).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi empiris terdahulu oleh (Haldi, 2023) dengan judul Analisis Pengaruh Korupsi, Investasi, dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Asia-Pasifik yang menggunakan alat analisis *Granger Causality Test*, mengungkapkan bahwa

terdapat hubungan kausalitas atau hubungan dua arah antara tingkat korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, temuan ini mengungkapkan bahwa korupsi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dari penelitian ini ditemukan kesenjangan antara teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan oleh (Romer, 1990) dan (Lucas, 1988), dalam teorinya diungkapkan bahwa korupsi cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme distorsi pasar, ketidakpastian kebijakan, serta peningkatan biaya transaksi ekonomi. Kemudian, menurut studi *World Bank* dan *Transparency International* (2021), negara-negara ASEAN menunjukkan variasi dalam hal Indeks Persepsi Korupsi, negara seperti Singapura memiliki skor yang relatif tinggi, sementara beberapa negara lain masih menghadapi tantangan serius terkait korupsi.

Sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya hanya menganalisis bagaimana korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi masih sedikit yang meneliti hubungan timbal balik antar keduanya. Minimnya penelitian kausal antara Indeks Persepsi korupsi dan pertumbuhan ekonomi serta kesenjangan empiris yang telah dibahas sebelumnya menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan kausalitas antara Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kemudian juga menguji kebenaran asumsi teoritis pertumbuhan ekonomi endogen dalam konteks regional yang spesifik. Penelitian ini akan dilakukan dalam ruang lingkup negara-negara keanggotaan ASEAN, terkecuali Brunei Darussalam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kausalitas Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi literatur ekonomi pembangunan dengan mengungkap hubungan kausalitas antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks negara-negara ASEAN. Apakah fokus pada pemberantasan korupsi akan memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif dalam mengurangi korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara keanggotaan ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN tahun 2012-2023?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN tahun 2012-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN tahun 2012-2023.
2. Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN tahun 2012-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup aspek akademis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah pengetahuan tentang analisis hubungan kausalitas Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya pembangunan ekonomi di ASEAN.
- c. Sebagai referensi dan sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pembuat kebijakan tentang upaya pemberantasan korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya.
- b. Menjadi referensi bagi investor dalam memahami dinamika korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ASEAN, yang akan membantu dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa batasan agar fokus penelitian menjadi lebih terarah. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Timor Leste belum menjadi negara keanggotaan resmi, namun sudah menjadi anggota yang berstatus sebagai pengamat di ASEAN.
2. Brunei Darussalam tidak diikutsertakan dalam penelitian, dikarenakan data Indeks Persepsi Korupsi Brunei Darussalam sudah tidak tersedia di halaman *Transparency International* sejak tahun 2014.